



▶ KINERJA DEWAN

Koko Usul Tunda Perjalanan Dinas

UMBULHARJO—Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja Sujanarko mewacanakan untuk menunda semua perjalanan dinas panitia khusus (pansus) pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) di akhir pembahasan. Wacana tersebut untuk memacu kinerja anggota Dewan agar menyelesaikan semua raperda yang masuk tahun ini sesuai dengan target.

Selama ini, perjalanan dinas pansus dilakukan di awal dan pertengahan pembahasan raperda. Setiap pansus mendapat kesempatan dua kali perjalanan dinas, berupa studi banding selama tiga hari dan perjalanan dinas konsultasi ke kementerian dengan durasi waktu dua hari.

"Perlu ada inovasi baru dalam proses kinerja Dewan. Misalnya terkait dengan konsekuensi antara hak dan kewajiban. Hak [perjalanan dinas] bisa didapatkan setelah menyelesaikan kewajibannya," kata Sujanarko, yang akrab disapa Koko di DPRD Kota Jogja, Senin (22/1).

Pada tahun ini ada 31 raperda yang akan dibahas, 12 di antaranya adalah raperda luncuran tahun lalu yang belum selesai. Koko mengatakan untuk raperda luncuran sudah tidak ada lagi fasilitas perjalanan dinas karena sudah difasilitasi pada 2017 lalu. Sehingga tahun ini yang difasilitasi perjalanan dinas sebanyak 16 raperda. Tiga raperda lainnya terkait dengan anggaran rutin yang jugatidak ada perjalanan dinasnya.

Koko mengaku tidak ingin pembahasan raperda banyak yang tertunda seperti tahun lalu. Terlebih saat ini semua anggota Dewan sudah mendapatkan tambahan tunjangan. Tambahan tunjangan ini sudah berlaku sejak Setember lalu melalui PP No.18/2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan.

Dalam waktu dekat ini, kata Koko, pimpinan Dewan segera

Pekerjaan Rumah DPRD

31 Raperda
 ■ Pada 2018 ini total ada 31 raperda yang masuk dalam pembahasan di DPRD Kota Jogja.

12 Raperda
 ■ Dari 31 raperda, 12 raperda di antaranya raperda luncuran tahun lalu yang belum selesai dibahas.

Anggaran
 ■ Di antara raperda yang akan dibahas terdapat tiga raperda anggaran.

Lain-lain
 ■ Raperda yang akan dibahas merupakan inisiatif Dewan dan Pemerintah Kota Jogja 2018.

Sumber DPRD

membahas berbagai konsekuensi dalam pembahasan raperda dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Selain soal penundaan perjalanan dinas, pimpinan Dewan dan Bapemperda juga akan membahas batas waktu maksimal penyelesaian tiap raperda.

Selama ini kerja pansus tidak memiliki batas waktu sehingga target raperda tahun lalu tidak sesuai target dan harus menjadi luncuran di tahun ini. Koko mengklaim dalam pembicaraan informal dengan Bapemperda sudah ada kesamaan pandangan perlunya membatasi waktu penyelesaian setiap raperda. "Tinggal menentukan waktunya berapa lama," kata dia.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menyatakan dengan adanya batasan waktu, semua anggota Dewan tidak bisa *leha-leha* lagi dalam membahas raperda.

Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kota Jogja, Bambang Anjar Jalumurti mengatakan belum ada pembicaraan terkait dengan penundaan soal kunjungan

kerja untuk memacu segera terselesainya pembahasan raperda. Menurut dia, wacana itu perlu dimusyawahkan dengan pansus karena perjalanan dinas pansus melekat pada materi yang dibahas di pansus. "Kira-kira kebutuhan data pansus itu dibutuhkan di awal atau di akhir. Itu pansus yang mengetahui," kata dia.

Apresiasi
 Namun, Bambang mengapresiasi usulan Koko sehingga perlu dibahas lebih lanjut di Bapemperda apakah perjalanan dinas lebih tepat di awal atau di akhir. Bambang menyatakan yang paling penting adalah pembatasan waktu pembahasan raperda sehingga pansus memiliki tata kala penyelesaian.

Ia mencontohkan untuk pansus induk atau yang bobot materinya cukup berat seperti Raperda Tata Ruang dan Raperda Induk Penataan Kepariwisataaan, bisa diberikan waktu tiga bulan. Namun raperda yang bobot materinya ringan atau yang sifatnya hanya mengubah

perda lama bisa diberi waktu penyelesaian selama dua bulan atau kurang dari itu.

Untuk menilai bobot materi raperda, kata Bambang, bisa dibahas di Bapemperda dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Jogja. Setelah ada pembatasan waktu, setiap pansus harus membawa materi raperda dalam sidang paripurna jika waktunya sudah habis. "Nanti keputusan bisa di paripurna apa saja alasannya belum selesai, dan butuh berapa lama jika harus diperpanjang," ujarnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengaku secara pribadi sepakat dengan apa yang menjadi usulan Sujanarko. Usulan-usulan tersebut perlu dibicarakan dalam rapat Bapemperda untuk menentukan pilihan-pilihan yang paling tepat agar target kinerja Dewan tahun ini dapat terealisasi. Bambang juga menyadari tahun politik yang disadari atau tidak dapat mempengaruhi kinerja Dewan. (Ujang Hasanudin)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005